

BAB V

PENUTUP

Kekerasan seksual terhadap perempuan tak kunjung surut dari negeri ini. Berbagai data menunjukkan bahwa jumlah kasus pemerkosaan di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) masih tergolong tinggi sehingga perlu mendapat perhatian dari semua pihak terkait.

Berbagai kasus pemerkosaan di Jateng tak luput diberitakan oleh berbagai media massa, salah satunya adalah *Suaramerdeka.com*. *Suaramerdeka.com* merupakan media online lokal berbasis media cetak pertama di Indonesia. Bertitik tolak dari realita tersebut, penelitian ini dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam paradigma kritis melalui kerangka analisis wacana kritis dengan dukungan metode analisis isi framing Entman (level mikro), etnografi (level meso kaitannya dengan kebijakan redaksi), analisis resepsi (level meso kaitannya dengan praktik konsumsi teks). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut dipaparkan simpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

5.1. Simpulan

Pertama, terjadi kekerasan simbolik berupa *blaming the victim* di *Suaramerdeka.com*. Praktik *blaming the victim* terjadi manakala korban dianggap turut bertanggung jawab terhadap peristiwa pemerkosaan yang menimpanya atau turut menikmati berhubungan seks dengan pelaku. Teks yang diteliti adalah berita kekerasan seksual dengan unsur *blaming the victim* yang disiarkan di

Suaramerdeka.com antara Januari 2016 hingga Desember 2017 (dua tahun). Jumlah berita tentang kekerasan seksual dengan unsur *blaming the victim* pada periode tersebut sebanyak 64 berita. Dari total jumlah berita tersebut, dipilih 5 (lima) berita untuk dianalisis secara mendalam dengan Framing Entman. Lima berita yang dipilih dengan pertimbangan memiliki derajat *blaming the victim* tertinggi menurut peneliti. *Blaming the victim* tinggi adalah menilai aktor korban menikmati hubungan seks dengan pemerkosa (*sexual consent*).

Kedua, terjadinya *blaming the victim* ternyata tidak bisa lepas karena berlangsungnya alienasi gender dan pemilihan diksi bias gender semacam “digilir” yang mengandaikan korban tak lebih sebagai obyek seks. Alienasi gender terjadi manakala korban tidak dihadirkan sebagai narasumber pada berita pemerkosaan yang menyimpannya. Narasumber yang dihadirkan justru pihak-pihak yang dianggap memiliki otoritas tetapi tidak sadar gender. Proses alienasi gender yang meniadakan pendapat korban kekerasan seksual (sebagai narasumber berita) atau yang mewakili korban masih terus dipraktikkan hingga sekarang di *newsroom Suaramerdeka.com*. Praktik alienasi gender sesungguhnya menambah luka perih korban pemerkosaan dan amat menyesatkan bagi pembacanya.

Ketiga, dalam proses produksi dan reproduksi berita *blaming the victim* di *newsroom Suaramerdeka.com* antara editor perempuan dan editor laki-laki, sama-sama masih bias gender. Peran editor sebagai pihak yang berkewajiban mengkayakan atau mendalamkan informasi pada berita belum secara maksimal dilakukan. Dalam kaitannya dengan berita *blaming the victim*, struktur gender editor perempuan di *Suaramerdeka.com* banyak digunakan untuk mereproduksi

struktur dominan dengan meloloskan berita tersebut. Hal ini tentu saja menyesatkan bagi masyarakat. Penyesatan bagi masyarakat oleh media dikentarkan oleh temuan empiris di lapangan, diketahui bahwa pembaca berita kekerasan seksual di *Suaramerdeka.com* yang digolongkan sebagai generasi Z juga turut menyalahkan korban pemerkosaan. Pemahaman yang salah dari generasi Z mengenai korban akan membuat mereka secara salah pula memahami dunia. Pasalnya, hal demikian menumbuhkan bibit diskriminasi gender dan akan mengakar kuat hingga mereka dewasa kelak. Apabila hal tersebut terus terjadi, maka posisi perempuan semakin terdominasi di segala lini kehidupan. Pandangan salah para generasi Z mengenai peran dan status sosial antara laki-laki dan perempuan di masyarakat akan berdampak pada langgengnya praktik budaya patriarki.

Keempat, terjadi proses produksi dan reproduksi berita *blaming the victim* di *Suaramerdeka.com* dikarenakan agen-agen yang terlibat di dalam *newsroom* masih mengikuti ideologi dominan (ideologi patriarki). Proses tersebut terjadi dikarenakan beberapa hal sebagai berikut ini: (1) Pada proses eksekusi pencarian berita oleh wartawan tidak diutamakan mencari pendapat narasumber lain sebagai keberimbangan. Proses pencarian berita oleh wartawan online lebih diutamakan pada kecepatan memperoleh berita sehingga berakibat abai pada keberimbangan berita; (2) SOP perlakuan pada berita kekerasan seksual hanya sebatas menyamakan nama korban dan tidak mengungkap identitas secara jelas. Hal-hal terkait penggunaan diksi yang ramah perempuan kurang diperhatikan; (3) Pada proses *monitoring*, sering kali berita kekerasan seksual tidak di *follow up* lebih

lanjut untuk mencapai keberimbangan dan tidak ada evaluasi dari Editor, Pemred, dan Redpel berkaitan dengan hal tersebut; (4) Tidak adanya Redpel yang menangani bidang kriminalitas. Selama ini terdapat tiga Redpel di *Suaramerdeka.com*. masing-masing Redpel memiliki pembedangan atau spesialisasi. I nengah Segara Seni bidang olah raga dan pariwisata, Murdiyatomoko bidang politik, ekonomi, dan pendidikan, Bambang Is bidang seni dan budaya. Hal ini penting untuk dikritisi, mengingat Redpel merupakan pengendali produk yang tayang di *Suaramerdeka.com*. (5) Tidak ada pelatihan gender para personil *Suaramerdeka.com*. Pelatihan gender terakhir diadakan tiga tahun lalu oleh HRD *Suara Merdeka* Grup. Kesadaran gender para personil *Suaramerdeka.com* perlu diasah lagi melalui pelatihan-pelatihan gender secara internal.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh perlu dilakukan upaya-upaya tertentu oleh pihak-pihak terkait guna mengatasi persoalan sosial yang muncul diakibatkan adanya persoalan *blaming the victim* pada berita kekerasan seksual di media massa.

5.2.1. Rekomendasi Teoritis

Secara teoritis, dengan mencermati kritik yang ada terhadap teori strukturasi gender yang digunakan dalam penelitian ini hanya menjelaskan diskriminasi kaitannya dengan gender. Diskriminasi terkait ras, agama, dan suku belum menjadi bahasan pada penelitian ini.

5.2.2. Rekomendasi Praktis

Secara praktis, perlu dilakukan penyadaran gender dalam institusi *newsroom* media massa guna memberikan pemahaman memadai kepada semua pekerjanya, baik laki-laki maupun perempuan, akan arti penting menciptakan relasi gender simetris dan egalitarian dengan memperhatikan terciptanya berita *cover both side* (berimbang) yang membela dan melindungi korban.

5.2.3. Rekomendasi Sosial

Secara sosial, perlu dikondisikan penciptaan properti gender memadai pada semua aktor di perusahaan media melalui kegiatan advokasi penyadaran gender, baik terstruktur melalui kurikulum pendidikan atau tidak terstruktur melalui kegiatan dialog publik, seminar, FGD. Selain itu, perlu juga dikondisikan penerapan kebijakan media sensitif gender dengan menekankan pada keberimbangan penulisan berita pemerkosaan di *newsroom*. Selain itu, perlu juga dilakukan advokasi yang menyadarkan masyarakat, khususnya generasi muda untuk memiliki literasi media berbasis gender sejak dini. Literasi media berbasis gender diharapkan mampu menciptakan kondisi menuju masyarakat berkeadilan gender.